

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Brotodihardjo (1993, dalam Halim Abdul dkk, 2016). Bagi negara-negara yang ada di dunia ini, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara tak terkecuali di Indonesia. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap APBN Tahun 2011-2017

Tahun	Penerimaan Pajak	% dari Target	Target
2011	Rp. 872,6 T	99,3%	Rp. 878,7 T
2012	Rp. 835,2 T	94,38%	Rp. 885, 02 T
2013	Rp. 1042,32 T	68,14%	Rp. 1529,67 T
2014	Rp. 1537,2 T	94%	Rp. 1635,4 T
2015	Rp. 1061,3 T	82%	Rp. 1294,3 T
2016	Rp. 1032,2 T	76,17%	Rp. 1355,2 T
2017	Rp. 1.750,3 T	77,6%	Rp. 1.498,9 T

Sumber: www.kemenkeu.go.id (2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,83% jika dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah harus semakin gencar untuk memungut pajak kepada semua lapisan masyarakat tak terkecuali sebuah perusahaan.

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak. Setiap perusahaan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap pajak merupakan suatu beban murni yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap keuntungan perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan (Hardika, 2007) sehingga perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan pajak yang merujuk kepada satu tujuan yaitu, mengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar hutang pajaknya berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Perlakuan tersebut biasa disebut dengan *tax avoidance*.

Menurut Pohan(2011:14), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan. Ada 12 cara pengukuran *Tax Avoidance* yang dapat digunakan (Hanlon dan Heizman, 2010).

Penelitian kali ini, peneliti menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yakni menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. *CETR (Cash Effective Tax Rate)* merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan. Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus kas tahun berikut pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak (Dyrenge, et. Al, 2010).

Tax avoidance juga terkadang sering kali menimbulkan bias yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak. Pertanyaan apakah tindakan *tax avoidance* menarik peminat para pemegang saham atau tidak jika aktivitas *tax avoidance* dalam pelaksanaannya justru meningkatkan biaya yang lain. Disamping itu timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham, jika tidak maka tidak perlu untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dipengaruhi oleh *corporate governance* dalam melakukan praktik penghindaran pajak. *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Para investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Ujiyantho dan Pramuka,

2007).Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*).Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998).

Banyak pihak mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi adalah lemahnya *coporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia (Elita, 2013).Ketika dinamika corporate governance dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012).

Baik pemerintah maupun investor sejak saat itu mulai memberikan perhatian cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. Memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governancedan* mengeluarkan pedoman *good corporate governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. *Good corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002). Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Konsep *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (CGPI, 2008). Menurut Sutedi (2012:80) agar *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dimengerti dan diterapkan dengan baik, perlu dimengerti dan diterapkan dengan baik, perlu dicermati kajian yang dilakukan oleh *Organization for Economic and Development* (OECD) terhadap prinsip-prinsip utama *corporate governance*.

Pengkajian tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang cukup representatif sebagai konsensus internasional bahwa *corporate governance* yang efektif meliputi empat aspek penting, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Aspek kewajaran terutama ditujukan

untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dari kecurangan, *self dealing* (transaksi antara perseroan dengan direksi, yang dalam sejarah hukum semula dilarang), atau ketidakwajaran lainnya. Aspek transparansi dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Aspek akuntabilitas dimaksudkan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif diantara direksi, manajer, auditor, dan pemegang saham. Adapun aspek tanggung jawab dimaksudkan tanggap terhadap *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sehingga *corporate governance* nantinya memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Dasar pengenaan pajak adalah laba atau keuntungan perusahaan. Laba diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Laba sebelum pajak yang tinggi akan berakibat pada pembayaran pajak yang tinggi juga, sehingga pemilik perusahaan mengizinkan manajer untuk menekan pajak, yakni dengan melaporkan laba yang rendah. Namun di lain pihak, manajer juga menginginkan bonus jika kinerjanya bagus. Kinerja manajemen diukur dengan laba yang diperoleh. Jika laba meningkat, maka bonus yang diperoleh manajemen juga akan semakin meningkat. Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan semakin tinggi marjin laba yang dihasilkan perusahaan. Adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak akan meningkat (Irawan, 2012).

Pada penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite

audit, prosentase dewan komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi) terhadap *cedr* dengan menyertakan ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2015:41). Diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan (Siregar dan Utama, 2005). Ukuran perusahaan dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardyansyah, 2014).

Perusahaan yang dikategorikan berskala besar dianggap memiliki tingkat agresif pajak yang lebih besar (Lanis dan Richardson, 2007 dalam Ardyansyah, 2014). Variabel kontrol kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang menjadi indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan.

Biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010). Tingkat hutang perusahaan juga digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Tingkat hutang perusahaan merupakan penggunaan hutang untuk

membayai investasi (Kurniasih dan Sari, 2013).Perusahaan lebih memilih menggunakan hutang sebagai sumber dana karena hutang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan lebih kecil (Anna, 2012). Penghematan pajak dapat menjadikan laba yang diperoleh perusahaan pun cukup besar.

Penelitian ini menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.Hal ini mengingat BEI merupakan tempat yang memungkinkan untuk mengakses laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karenaperusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya, sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar terlihat dari per sektor usahanya dibandingkan sektor lainnya yaitu tahun 2012 sebesar 316,49 triliun dan tahun 2013 sebesar 333,73 triliun (*Inside Tax* ed. 18, 2013).Laporan keuangan yang akan digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengambil judul: **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *CETR* Dengan Mempertimbangkan Beberapa Faktor Sebagai Variabel Kontrol” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2016).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dan ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diklasifikasikan, maka dapat diklasifikasikan pula tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, jumlah komite audit, persentase dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dan ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, diantaranya adalah:

1) Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada pemerintah selaku pihak regulator dalam menangani praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan evaluasi dan saran kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat

mempertimbangkannya dalam membuat kebijakan sebagai langkah preventif. Selain itu, manfaat lainnya yaitu dapat memberikan masukan kepada investor untuk menilai dan menginvestasi *corporate governance* ketika akan melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan.

2) **Kontribusi Akademis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *corporate governance* sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sumber literatur dan menjadi referensi untuk didempurnakan pada penelitian selanjutnya yang menunjukkan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan diperlukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pokok-pokok isi penelitian serta mempermudah dalam penggunaan nanti, berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas penjelasan tentang kajian pustaka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan yang terkait dengan *corporate governance*. Bab ini menyajikan pula antar hubungan antar variabel, serta model hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang dilakukan, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang proses pengolahan data yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Bab ini akan menyajikan analisis hasil penelitian yang meliputi pembahasan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana dan analisis regresi linier berganda.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang akan memaparkan secara singkat hasil dari penelitian, mengungkapkan keterbatasan penelitian, dan memberikan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

